



## **Dampak Modal Sosial dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan BUMDes di Kabupaten Gorontalo**

**Kayla Az Zahra Abd. Latief<sup>1\*</sup>, Herlina Rasjid<sup>2</sup>, Srie Isnawaty Pakaya<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Manajemen Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Korespondensi penulis: [azzahralatief77@gmail.com](mailto:azzahralatief77@gmail.com)\**

**Abstract.** This research is motivated by the importance of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as drivers of the village economy, in accordance with Permendesa PDTT Number 4 of 2015, which aims to improve community welfare through the management of assets, services, and businesses. However, many BUMDes face obstacles such as the low quality of human resources managers, a lack of understanding of financial literacy among the community, and sub-optimal relations with the village government, which cause many BUMDes to be inactive or not yet contribute significantly. In Gorontalo Regency, out of 191 BUMDes in 2020, 61 had not yet reported financial administration due to the managers' lack of capability. Transparent, accountable, and sustainable financial management of BUMDes requires adequate financial literacy. In addition, social capital in the form of traditions, networks, and trust in rural areas plays an important role in driving BUMDes economic activities and realizing welfare and poverty alleviation. Although the financial literacy rate in Gorontalo society reached 49.68% in 2022, there is still a gap with financial inclusion, which reached 85.10%. Therefore, this study aims to analyze the impact of social capital and financial literacy on the financial inclusion of BUMDes in Gorontalo Regency.

**Keywords:** BUMDes; Financial Inclusion; Financial Literacy; Gorontalo Regency; Social Capital

**Abstrak.** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi desa sesuai Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset, jasa, dan usaha. Meskipun demikian, banyak BUMDes menghadapi kendala seperti rendahnya kualitas SDM pengelola, kurangnya pemahaman literasi keuangan masyarakat, dan belum optimalnya relasi dengan pemerintah desa, yang menyebabkan banyak BUMDes tidak berjalan atau belum memberikan kontribusi signifikan. Di Kabupaten Gorontalo, dari 191 BUMDes pada tahun 2020, 61 di antaranya belum melaporkan administrasi keuangan akibat kurangnya kemampuan pengelola. Pengelolaan keuangan BUMDes yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan memerlukan literasi keuangan yang memadai. Selain itu, modal sosial dalam bentuk tradisi, jaringan, dan kepercayaan di pedesaan berperan penting dalam mengerakkan kegiatan ekonomi BUMDes dan mewujudkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Meskipun tingkat literasi keuangan masyarakat Gorontalo mencapai 49,68% pada tahun 2022, masih terdapat kesenjangan dengan inklusi keuangan yang mencapai 85,10%. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak modal sosial dan literasi keuangan terhadap inklusi keuangan BUMDes di Kabupaten Gorontalo.

**Kata kunci:** BUMDes; Inklusi Keuangan; Kabupaten Gorontalo; Literasi Keuangan; Modal Sosial

### **1. LATAR BELAKANG**

Maklumat yang dituangkan dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Perubahan BUMDes, Dimana dalam aturan ini ditekankan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa ataupun Masyarakat melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa maupun dalam bentuk investasi guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk besar-besarnya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai entitas bisnis yang berorientasi laba dan berdedikasi untuk kesejahteraan komunitas, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki beragam opsi pengembangan usaha. Sesuai dengan mandat undang-undang dan tujuan pendiriannya di tingkat desa, BUMDes dapat beroperasi melalui berbagai sektor seperti penyediaan layanan publik, aktivitas perdagangan, jasa keuangan, skema usaha gabungan, peran perantara, dan bisnis penyewaan.

Kendala utama yang menghambat operasional dan pengembangan usaha BUMDes secara optimal seringkali bersumber dari rendahnya kapasitas sumber daya manusia. Hal ini mencakup kelemahan dalam pengembangan bisnis serta pengelolaan keuangan. Selain itu, minimnya pemahaman literasi keuangan di kalangan masyarakat juga turut mempersulit partisipasi aktif mereka dalam mendukung pertumbuhan BUMDes.

BUMDes menghadapi beberapa tantangan serius. Mayoritas penduduk desa masih kurang memahami dan menyadari peran krusial BUMDes dalam meningkatkan kemakmuran desa, bahkan sering menganggap bahwa keberadaan BUMDes belum memberikan dampak langsung yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Di sisi lain, BUMDes belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen vital untuk menciptakan ekonomi desa yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara BUMDes dan pemerintah desa juga belum terintegrasi optimal sebagai bagian dari upaya pemberdayaan komunitas desa.

Sejak pemberlakuan regulasi BUMDes, Provinsi Gorontalo telah aktif mengembangkan inisiatif pembangunan BUMDes guna menguatkan ekonomi lokal. Hampir seluruh kabupaten di wilayah Gorontalo kini memiliki BUMDes. Pembentukan BUMDes ini diselaraskan dengan kebutuhan dan potensi unik masing-masing desa, contohnya meliputi pengembangan destinasi wisata desa, pengelolaan pasar tradisional, layanan simpan pinjam, dukungan bagi UMKM, dan ragam usaha lainnya. Implementasi konsep pendirian BUMDes diinisiasi melalui optimalisasi kapasitas dan kegiatan ekonomi yang telah berjalan dan dikelola di tingkat desa.

Meskipun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan menjadi pendorong utama ekonomi pedesaan dan di sejumlah lokasi telah beroperasi sesuai harapan pemerintah, namun banyak BUMDes lain yang belum mencapai kinerja optimal. Studi Novita Riyanti (2021) menunjukkan bahwa dari 45.549 BUMDes yang terbentuk hingga tahun 2019, sebanyak 2.186 (4,8%) dinyatakan tidak beroperasi atau tidak aktif, sementara sekitar 16.397 BUMDes diperkirakan belum memberikan kontribusi ekonomi signifikan bagi pemerintah desa.

Audit dan evaluasi BUMDes di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2020 mengungkapkan adanya 191 BUMDes. Laporan media harian Gorontalo juga menyoroti bahwa 61 dari 191 BUMDes di wilayah tersebut belum menyampaikan laporan administrasi keuangan, dengan alasan pengurus sedang dalam proses penertiban administrasi. Kondisi ini mencerminkan

lemahnya manajemen BUMDes dalam mengelola aset desa demi kemandirian ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat. Kesenjangan ini seringkali disebabkan oleh minimnya kapasitas pengelola BUMDes, yang berdampak pada stagnasi pengembangan usaha. Sebagai respons, Dinas Pemberdayaan Desa berinisiatif melakukan berbagai terobosan, termasuk program peningkatan kapasitas (Capacity Building), untuk mendukung revitalisasi BUMDes.

Konsep pengelolaan keuangan BUMDes mengacu pada strategi efisien dan efektif dalam mengatur sumber daya finansial guna memacu pembangunan ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan warganya. BUMDes, sebagai institusi yang mengemban tugas mengelola beragam usaha di tingkat lokal, memerlukan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi tercapainya target sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan.

Progres BUMDes di desa tak lepas dari pengaruh modal sosial, yang terwujud melalui tradisi dan kearifan lokal masyarakat pedesaan. Modal sosial ini terbentuk dalam interaksi sosial dan tradisi yang mengakar di desa, yang juga berperan penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, modal sosial menjadi kekuatan pendorong yang signifikan dalam memotivasi partisipasi warga desa dalam kegiatan BUMDes.

Modal sosial memiliki dampak besar terhadap kinerja BUMDes, khususnya dalam meningkatkan tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan pengembangan organisasi demi kesejahteraan masyarakat desa. Lebih lanjut, modal sosial juga memfasilitasi terciptanya aktivitas ekonomi yang menguntungkan. Hal ini karena modal sosial, yang diartikan sebagai sumber daya yang mencakup jaringan, hubungan, norma bersama, serta sikap saling percaya dan kooperatif, mendorong produktivitas berkelanjutan dalam masyarakat, sebuah produktivitas yang pada gilirannya akan menopang kegiatan ekonomi.

Meskipun definisi modal sosial terkesan lugas, pemahamannya membutuhkan tinjauan kritis. Norma, jaringan, dan kepercayaan kerap diidentifikasi sebagai komponen inti modal sosial. Konsep ini mungkin memberikan kesan bahwa masyarakat yang memiliki modal sosial kuat dapat mengisolasi diri atau bertahan tanpa intervensi. Namun, penting untuk diingat bahwa modal sosial juga memiliki aspek negatif, seperti fokus berlebihan pada kepentingan kelompok internal yang berpotensi mengurangi kesejahteraan pihak lain.

Dalam beberapa tahun terakhir, literasi keuangan menjadi topik hangat di seluruh dunia. Penerapan literasi keuangan sangat esensial dalam pengelolaan BUMDes, di mana literatur pengelolaan keuangan diharapkan dapat menjadi panduan bagi pengelola. Namun, pada kenyataannya, banyak BUMDes masih belum memperoleh literasi memadai, akibat terbatasnya pelatihan dan informasi terkini. Idealnya, pengelola BUMDes memiliki latar belakang pendidikan di bidang keuangan untuk memastikan pengelolaan yang optimal;

sayangnya, banyak yang tidak memiliki latar belakang tersebut. Oleh karena itu, penting adanya pengelola dengan kapasitas dan kepribadian yang kuat untuk menjalankan tugas keuangan secara efektif dan tepat waktu.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa terdapat disparitas substansial antara tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat. Data menunjukkan bahwa literasi keuangan mencapai 49,68%, sedangkan inklusi keuangan berada pada angka 85,10%. Kesenjangan yang signifikan sebesar 35,43% ini mengindikasikan bahwa akses terhadap layanan keuangan yang luas belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai literasi keuangan di kalangan publik.

Merujuk pada latar belakang tersebut, riset ini berfokus pada analisis komprehensif mengenai peran modal sosial dan literasi keuangan dalam mempengaruhi inklusi keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Kabupaten Gorontalo. Adapun judul penelitian yang diusung adalah 'Dampak Modal Sosial dan Literasi Keuangan terhadap Inklusi Keuangan BUMDes di Kabupaten Gorontalo'.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah entitas komersial yang modalnya sepenuhnya berasal dari pemerintah desa dan dioperasikan oleh komunitas lokal, dengan sasaran primer untuk mengoptimalkan kondisi ekonomi dan kemakmuran warga desa. Pendirian BUMDes diharapkan dapat menstimulasi aktivitas ekonomi produktif melalui pemanfaatan optimal sumber daya manusia (SDM) dan potensi kekayaan alam desa, selaras dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Menurut publikasi Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007), BUMDes merepresentasikan sebuah institusi ekonomi yang diinisiasi serta dikelola secara kolaboratif oleh masyarakat dan pemerintah desa. Pembentukannya didasarkan pada identifikasi kebutuhan dan potensi unik masing-masing desa, dengan fungsi strategis sebagai instrumen penguatan ekonomi lokal. Oleh karena itu, BUMDes dituntut untuk mengembangkan karakteristik distintif yang membedakannya dari lembaga ekonomi konvensional, guna menjamin kapabilitasnya dalam memberikan kontribusi substansial terhadap elevasi kesejahteraan desa. Hal ini juga krusial untuk mencegah penetrasi dominasi sistem kapitalistik yang berpotensi mengikis nilai-nilai komunal pedesaan.

Prosedur pendirian dan perumusan program usaha BUMDes wajib dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Desa. Forum ini berfungsi sebagai platform pengambilan keputusan fundamental, meliputi penetapan identitas kelembagaan, pemilihan jajaran pengelola, serta penentuan lini usaha yang akan diimplementasikan.

Meskipun BUMDes didirikan sebagai organisasi desa yang mengandalkan aset, potensi internal, serta penyertaan modal dari desa untuk mendorong peningkatan kesejahteraan, penting untuk digarisbawahi bahwa tidak seluruh aspek pemberdayaan ekonomi desa menjadi kewenangan atau tanggung jawab BUMDes secara eksklusif. BUMDes hadir sebagai institusi pendukung yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, namun bukan merupakan solusi tunggal untuk seluruh permasalahan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh desa (Berdesa, 2018).

Berdasarkan Permendesa No. 4 Tahun 2015, tujuan pendirian BUMDes secara rinci meliputi: 1.) Peningkatan pertumbuhan ekonomi desa,2.) Mengoptimalkan aset desa demi kesejahteraan,3.) Memperkuat partisipasi warga dalam mengelola ekonomi desa,4.) Merancang strategi serta kemitraan usaha antar desa dan pihak ketiga,5.) Membuat peluang pasar serta koneksi untuk membantu layanan publik desa,6.) Menyediakan lowongan pekerjaan,7.) Peningkatan taraf hidup warga desa,8.) Menaikkan *income* warga dan *income* desa.

## **Modal Sosial**

Modal sosial dapat diartikan sebagai kapasitas kolektif masyarakat untuk bekerja sama, guna mencapai tujuan bersama. Ia mewakili seperangkat aturan atau norma yang berpotensi melahirkan sumber daya baru dalam komunitas. Modal sosial dipercaya sebagai elemen krusial yang menggerakkan kesatuan kerja sama antarindividu, mendorong kemajuan bersama.

Berbagai ahli memiliki pandangan beragam mengenai modal sosial, namun secara umum, ia merujuk pada serangkaian elemen dalam kelompok masyarakat yang mencakup kepercayaan, jaringan, dan nilai-nilai norma yang saling terhubung. Modal sosial merefleksikan kerja sama, pembangunan kepercayaan, dan perluasan jaringan sosial. Burt (2000) mendefinisikannya sebagai hubungan yang terjalin dengan teman, rekan kerja, dan secara umum, jaringan sosial yang membuka kesempatan untuk memanfaatkan modal ekonomi dan sumber daya manusia.

Penelitian Fahmi dan Widiastuti (2019) mengkaji peran vital modal sosial dalam mendukung kinerja BUMDes. Studi ini menegaskan bahwa modal sosial, seperti kepercayaan dan jaringan sosial, secara efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas

ekonomi desa, yang pada akhirnya berkontribusi pada inklusi keuangan. Senada dengan itu, Widodo (2020) melalui penelitiannya tentang modal sosial dan inklusi keuangan di lingkungan BUMDes, menyoroti bahwa aspek modal sosial yang kuat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan BUMDes.

Wahyu dan Prasetyo (2021) turut mengulas modal sosial dan pengelolaan keuangan pada BUMDes di Indonesia. Penelitian mereka menunjukkan bahwa modal sosial yang terbangun di tengah masyarakat desa dapat memperluas akses komunitas terhadap layanan keuangan dan memperkuat keberlanjutan BUMDes. Faktor-faktor utama modal sosial yang memengaruhi inklusi keuangan di BUMDes dapat dikategorikan menjadi tiga elemen penting: 1.) Kepercayaan (*Trust*): Berperan sebagai fondasi utama dalam setiap interaksi sosial dan ekonomi, termasuk dalam konteks operasional BUMDes, 2.) Jaringan Sosial (*Social Networks*): Berfungsi sebagai beragam saluran komunikasi dan interaksi yang menghubungkan antarindividu dalam masyarakat, 3.) Norma Sosial (*Social Norms*): Norma yang mendorong semangat kebersamaan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program inklusi keuangan yang diinisiasi oleh BUMDes.

### **Literasi Keuangan (*Financial Literacy*)**

Literasi keuangan, sebagaimana diuraikan oleh Rustandi Kartawinata (2018), merujuk pada kapabilitas individu dalam mengelola pendapatan. Lebih jauh, Pulungan (2020) menginterpretasikannya sebagai akumulasi kesadaran, pengetahuan, keahlian, etika, serta sikap yang fundamental dalam pengambilan keputusan finansial, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan personal.

Sudut pandang ini selaras dengan argumen yang diajukan oleh Briliani (2020), yang secara eksplisit menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan kompetensi esensial yang wajib dikuasai setiap individu. Kompetensi tersebut berperan krusial dalam mengoptimalkan kualitas hidup melalui pemahaman komprehensif mengenai perencanaan dan alokasi sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, Aprinthusari dan Widiyanto (2020) mengartikulasikan literasi keuangan sebagai kapabilitas numerik dan pemahaman konseptual ekonomi dasar yang sangat diperlukan untuk mengimplementasikan keputusan yang tepat terkait aktivitas menabung dan peminjaman. Safryani A. (2020) melengkapi perspektif ini dengan mengemukakan bahwa literasi keuangan adalah kapasitas untuk merumuskan penilaian yang terinformasi dan mengaktualisasikan keputusan finansial secara efektif, berdasarkan prinsip utilitas dan manajemen keuangan yang optimal.

Guna mengukuhkan beragam definisi literasi keuangan dari para pakar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76 Tahun 2016 mengelaborasi bahwa literasi keuangan mencakup empat komponen utama: Pengetahuan Keuangan (Financial Knowledge), Keterampilan dalam Pengelolaan Keuangan (Financial Skill), Keyakinan dalam Penggunaan Keuangan (Financial Confidence), dan Sikap Keuangan (Financial Attitude). Empat komponen ini berdampak secara kolektif pada Perilaku Manajemen Keuangan (Financial Management Behavior) seseorang, dengan tujuan fundamental untuk menginkrementasi kualitas pengambilan keputusan finansial demi tercapainya kesejahteraan. Adapun implikasi positif utama dari literasi keuangan mencakup: 1.) Optimalisasi Pengambilan Keputusan Finansial: Individu memperoleh kapabilitas untuk menyeleksi dan mengutilisasi produk serta layanan keuangan yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka. Selain itu, literasi keuangan memfasilitasi formulasi perencanaan finansial yang lebih terstruktur dan prospektif,2.) Proteksi Kapital Investasi: Literasi keuangan berfungsi sebagai instrumen preventif yang krusial, membantu individu menghindari keterlibatan dalam praktik investasi pada instrumen finansial yang ambigu atau memiliki tingkat risiko yang substansial,3.) Elaborasi Pemahaman Komprehensif: Literasi keuangan menyediakan landasan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek manfaat serta potensi risiko yang melekat pada beragam produk dan layanan jasa keuangan.

## **Inklusi Keuangan**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017, inklusi keuangan didefinisikan sebagai upaya strategis untuk memastikan akses yang komprehensif, adekuat, dan sesuai kebutuhan terhadap institusi, produk, serta layanan jasa keuangan. Aksesibilitas ini dirancang secara inklusif guna mengakomodasi kapabilitas dan realitas sosio-ekonomi masyarakat, dengan tujuan fundamental untuk menginkrementasi kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Consultative Group to Assist the Poor (melalui SNLKI, 2017) menekankan bahwa inklusi keuangan mencerminkan kemampuan rumah tangga serta pelaku usaha dalam mengakses dan memanfaatkan produk jasa keuangan secara efektif dan berkelanjutan. Kunci utamanya adalah ketersediaan yang stabil, regulasi yang jelas, serta kemitraan yang berkelanjutan antara institusi keuangan dan masyarakat.

Center for Financial Inclusion menambahkan bahwa inklusi keuangan bukan hanya tentang ada atau tidaknya akses, tetapi juga tentang kualitas akses: harus relevan, terjangkau, nyaman, sesuai profil pengguna, dan dilengkapi perlindungan konsumen. Ini harus berlaku

untuk seluruh lapisan masyarakat tak peduli status sosial, lokasi geografis, atau tingkat pendidikan.

SNLKI (2017) juga memperkuat bahwa inklusi keuangan adalah hak dasar atas akses terhadap produk keuangan yang bermanfaat, terjangkau, dan dapat digunakan secara bertanggung jawab mulai dari transaksi harian, pembayaran digital, tabungan, kredit, hingga perlindungan melalui asuransi. Semua itu harus dapat diakses secara adil dan berkelanjutan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 mengenai Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan menguraikan beberapa prinsip esensial, antara lain: 1.) Ekspansi Aksesibilitas,2.) Akselerasi Penyediaan Produk,3.) Peningkatan Utilisasi,4.) Optimasi Kualitas Pemanfaatan

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi desain pendekatan kuantitatif, di mana hubungan antar variabel dan konstanta didefinisikan melalui rumus matematika. Pendekatan ini memungkinkan menghasilkan output numerik spesifik dari input numerik tertentu. Hubungan yang telah dijelaskan kemudian dapat diuji dengan menetapkan kondisi yang telah ditentukan dan mengamati apakah hasil output sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan batas kesalahan pengukuran, seperti yang dijelaskan oleh Bordens & Abbott (2009).

Populasi dalam studi ini meliputi seluruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang beroperasi di Kabupaten Gorontalo, berjumlah total 191 entitas. Mengacu pada Sugiyono (2017:136), populasi didefinisikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek dengan kuantitas dan karakteristik spesifik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diobservasi dan dianalisis, guna memperoleh inferensi. Sampel penelitian ini secara spesifik menargetkan para pengelola BUMDes di Kabupaten Gorontalo. Pemilihan fokus pada pengelola ini didasari oleh peran esensial mereka sebagai aktor utama dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan pengambilan keputusan operasional BUMDes.

Pengambilan sampel dilaksanakan menggunakan teknik purposive sampling. Metode ini dipilih dengan tujuan menyeleksi responden yang dinilai paling relevan dan memiliki pemahaman komprehensif mengenai kondisi aktual BUMDes. Jumlah sampel yang berhasil terhimpun adalah 66 individu, yang merupakan pengelola atau pengurus BUMDes yang tersebar di berbagai desa di Kabupaten Gorontalo. Penekanan pada pengelola BUMDes ini juga semakin mengukuhkan fokus penelitian, dengan harapan bahwa temuan hasil dapat menjadi

basis bagi pemerintah daerah dan institusi terkait dalam merumuskan program pelatihan atau pendampingan yang lebih terarah dan efektif.

Data dalam penelitian ini diakuisisi melalui tiga teknik primer, yaitu instrumen kuesioner, observasi partisipatif, dan wawancara terstruktur. Selanjutnya, proses analisis data akan melibatkan serangkaian uji statistik inferensial, mencakup uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), serta uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Secara generik, teknik analisis data kuantitatif merujuk pada pendekatan komputasi dan statistik yang berfokus pada interpretasi numerik, matematis, atau statistik dari himpunan data.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

##### **Hasil Uji Validitas**

**Tabel 1.** Uji Validitas Variabel Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Modal Sosial (X1)	X1.1	0,715	0,361	Valid
	X1.2	0,649	0,361	Valid
	X1.3	0,555	0,361	Valid
	X1.4	0,630	0,361	Valid
	X1.5	0,661	0,361	Valid
	X1.6	0,690	0,361	Valid
	X1.7	0,661	0,361	Valid
	X1.8	0,719	0,361	Valid
	X1.9	0,728	0,361	Valid
	X2.1	0,600	0,361	Valid
Literasi Keuangan (X2)	X2.2	0,679	0,361	Valid
	X2.3	0,780	0,361	Valid
	X2.4	0,679	0,361	Valid
	X2.5	0,787	0,361	Valid
	X2.6	0,793	0,361	Valid
	X2.7	0,749	0,361	Valid
	X2.8	0,755	0,361	Valid
	X2.9	0,727	0,361	Valid
	Y.1	0,675	0,361	Valid
	Y.2	0,675	0,361	Valid
Inklusi Keuangan (Y)	Y.3	0,694	0,361	Valid
	Y.4	0,850	0,361	Valid
	Y.5	0,801	0,361	Valid
	Y.6	0,838	0,361	Valid
	Y.7	0,748	0,361	Valid
	Y.8	0,790	0,361	Valid
	Y.9	0,804	0,361	Valid

Berdasarkan data yang tertera dalam Tabel 1, seluruh nilai koefisien korelasi (R hitung) yang diperoleh secara empiris telah terbukti melampaui nilai ambang R tabel, yakni 0,361. Kondisi ini secara definitif mengonfirmasi bahwa semua butir pernyataan atau item dalam

instrumen kuesioner untuk variabel Modal Sosial (X1), Literasi Keuangan (X2), dan Inklusi Keuangan (Y) dinyatakan valid. Dengan demikian, seluruh butir pertanyaan tersebut dinilai layak dan dapat digunakan untuk pengujian dalam model penelitian ini.

### **Hasil Uji Reliabilitas**

**Tabel 2.** Hasil Uji Reliabilitas

<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Item Pernyataan</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Syarat Nilai</b>	<b>Keterangan</b>
Modal Sosial (X1)	9	0,886	0,60	Reliabel
Literasi Keuangan (X2)	9	0,918	0,60	Reliabel
Inklusi Keuangan (Y)	9	0,934	0,60	Reliabel

Sumber: Uji SPSS Vers. 29

Tabel 2 mengindikasikan bahwa setiap variabel menunjukkan koefisien Cronbach's Alpha yang signifikan, dimana nilainya melampaui ambang batas 0,60. Secara terperinci, variabel Modal Sosial (X1) merekam nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,886, variabel Literasi Keuangan (X2) mencapai 0,918, sedangkan variabel Inklusi Keuangan (Y) memperoleh nilai tertinggi yaitu 0,934. Oleh karena itu, dapat diinterpretasikan bahwa keseluruhan instrumen pernyataan variabel yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang substansial dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

### **Uji Asumsi Klasik**

#### **Hasil Uji Normalitas**

**Tabel 3.** Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,07024941
Most Extreme Differences	Absolute	,171
	Positive	,133
	Negative	-,171
Test Statistic		,171
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,036
	99% Confidence Interval	
	Lower Bound	,031
	Upper Bound	,041

Merujuk pada Tabel 3, hasil uji one-sample Kolmogorov-Smirnov mengindikasikan nilai signifikansi sebesar 0,036. Meskipun demikian, teridentifikasi adanya kekeliruan dalam interpretasi sebelumnya yang mengklaim normalitas distribusi data, mengingat kriteria standar untuk distribusi normal mengisyaratkan bahwa nilai signifikansi harus melebihi 0,05 ( $\text{Sig} > 0,05$ ). Berdasarkan temuan ini, dengan nilai signifikansi 0,036, data penelitian dalam konteks ini memenuhi asumsi distribusi normal.

### **Uji Multikolinearitas**

**Tabel 4.** Multikolinearitas

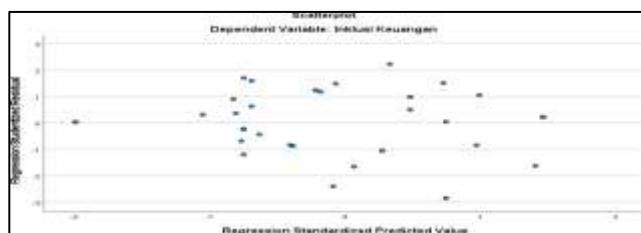
Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF		
1	(Constant)	4.229	2.868	1.474	.145		
	Modal Sosial	.070	.086	.065	.811	.420	.602
	Literasi Keuangan	.825	.080	.827	10.306	.000	.602

a. Dependent Variable: Inklusi Keuangan

Sumber: Uji SPSS Vers. 29

Mengacu pada data yang tersaji dalam Tabel 4, terobservasi bahwa variabel-variabel penelitian menampilkan nilai Tolerance sebesar 0,602, yang secara substansial melampaui kriteria ambang batas 0,05. Lebih lanjut, nilai Variance Inflation Factor (VIF) tercatat pada angka 1,661, yang secara signifikan berada di bawah batas maksimum 10. Konsekuensinya, parameter-parameter statistik ini secara kolektif menegaskan tidak adanya isu multikolinearitas yang signifikan antarvariabel independen dalam konstruksi model regresi yang diaplikasikan.

### **Uji Heterokedastisitas**



**Gambar 1.** Hasil Scatter Plot

Merujuk pada Gambar 1, hasil observasi mengindikasikan bahwa distribusi titik-titik data memperlihatkan pola sebaran yang acak dan tersebar secara merata, baik di wilayah atas maupun bawah garis nol pada sumbu Y. Karakteristik pola ini merupakan indikator bahwa model regresi yang diterapkan tidak memiliki isu heteroskedastisitas.

### **Uji Regresi Linear Berganda**

**Tabel 5.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardize d Coefficients t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.229	2.868	1.474	.145
	Modal Sosial	.070	.086	.065	.811 .420
	Literasi Keuangan	.825	.080	.827	10.306 .000

a. Dependent Variable: Inklusi Keuangan

Sumber: Uji SPSS Vers. 29

Berdasarkan hasil analisis data di atas, model regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Inklusi keuangan} &= \beta_0 + \beta_1 \text{modal sosial} + \beta_2 \text{literasi keuangan} + e = \\ & \text{Maka diperoleh inklusi keuangan} = 4,229 + 0,070 + 0,825 + e \end{aligned}$$

1.) Nilai konstanta dalam model regresi adalah 4,229. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen, yaitu sikap keuangan dan locus of control, berada pada titik nol, maka nilai prediksi perilaku pengelolaan keuangan akan sebesar 4,229. 2.) Variabel sikap keuangan ( $X_1$ ) menghasilkan koefisien regresi positif sebesar 0,070. Implikasi dari nilai ini adalah, dengan asumsi seluruh variabel independen lainnya dipertahankan konstan (ceteris paribus), setiap peningkatan satu unit pada tingkat sikap keuangan diproyeksikan akan meningkatkan perilaku pengelolaan keuangan sebesar 0,070 unit. 3.) Variabel locus of control ( $X_2$ ) menunjukkan koefisien regresi yang signifikan sebesar 0,825. Interpretasi dari temuan ini adalah, dengan mempertahankan variabel lain pada kondisi konstan (ceteris paribus), setiap peningkatan satu unit pada locus of control diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan perilaku pengelolaan keuangan sebesar 0,825 unit.

**Uji Partial (t)****Tabel 6.** Hasil Uji Partial (t)

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardize d	Coefficients t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.229	2.868		1.474	.145
	Modal Sosial	.070	.086	.065	.811	.420
	Literasi	.825	.080	.827	10.306	.000
	Keuangan					

a. Dependent Variable: Inklusi Keuangan

Sumber: Uji SPSS Vers. 29

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, diperoleh interpretasi sebagai berikut: 1.) Nilai t-hitung untuk variabel modal sosial tercatat sebesar 0,811, yang secara empiris lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel sebesar 1,669402. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh adalah 0,420, melampaui ambang batas kritis 0,05. Berdasarkan kriteria uji parsial dalam analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa variabel modal sosial ( $X_1$ ) tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel inklusi keuangan ( $Y$ ), 2.) Untuk variabel literasi keuangan, nilai t-hitung sebesar 10,306, yang secara substansial melampaui nilai t-tabel (1,669402). Tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah 0,000, berada di bawah ambang batas 0,05. Mengacu pada kriteria keputusan uji parsial, hal ini mengindikasikan bahwa variabel literasi keuangan ( $X_2$ ) memberikan pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel inklusi keuangan ( $Y$ ).

**Uji Simultan (F)****Tabel 7.** Hasil Uji Simultan (F)

ANOVA <sup>a</sup>		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Model						
1	Regression	862.581	2	431.291	97.533	.000 <sup>b</sup>
	Residual	278.586	63	4.422		
	Total	1141.167	65			

Sumber: Uji SPSS Vers. 29

Berdasarkan hasil uji F yang disajikan dalam Tabel 7, diperoleh nilai F-hitung sebesar 97,533 dengan tingkat signifikansi 0,000. Mengingat nilai signifikansi ini secara substansial lebih rendah dari ambang batas 0,05, dapat dikonklusikan bahwa variabel independen, yaitu Literasi Keuangan dan Modal Sosial, secara simultan memberikan kontribusi pengaruh yang

signifikan terhadap variabel dependen Inklusi Keuangan, khususnya dalam konteks Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### **Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

**Tabel 8.** Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.869 <sup>a</sup>	.756	.748	2.103
a. Predictors: (Constant), Literasi Keuangan, Modal Sosial				

Sumber: Uji SPSS Vers. 29

Berdasarkan analisis Model Summary yang tertera pada Tabel 8, nilai koefisien determinasi (R-square) dalam penelitian ini tercatat sebesar 0,756. Nilai ini mengindikasikan bahwa sekitar 75,6% variabilitas pada variabel dependen (Inklusi Keuangan) secara simultan dapat dijelaskan oleh kontribusi variabel independen, yaitu Literasi Keuangan dan Modal Sosial. Sementara itu, 24,4% sisanya dari total variabilitas tersebut dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diinkorporasikan ke dalam model penelitian ini.

## **Pembahasan**

### **Pengaruh Modal Sosial Terhadap Keuangan BUMDes**

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel modal sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di BUMDes Kabupaten Gorontalo. Adanya koefisien positif ini mengindikasikan bahwa peningkatan jaringan sosial, kepercayaan, serta norma yang dianut oleh pengurus dan masyarakat akan berkorelasi dengan peningkatan tingkat partisipasi mereka dalam memanfaatkan layanan keuangan BUMDes. Temuan ini konsisten dengan kerangka teori Coleman (1990) yang menekankan peran kepercayaan dan jaringan sosial dalam mengurangi biaya transaksi dan memfasilitasi arus informasi ekonomi. Senada dengan itu, Putnam (1993) juga mengemukakan bahwa modal sosial berfungsi sebagai pendorong kerja sama kolektif, termasuk dalam konteks pengelolaan keuangan di tingkat desa.

Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa pengurus BUMDes yang proaktif dalam membangun relasi sosial dengan masyarakat melalui musyawarah, kegiatan sosial kemasyarakatan, dan transparansi pengelolaan, berhasil menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat untuk menyimpan dana serta mengakses pembiayaan melalui lembaga desa. Kepercayaan yang terbangun ini berperan penting dalam mengurangi hambatan psikologis, sehingga Masyarakat lebih termotivasi untuk aktif dalam kegiatan simpan pinjam dan investasi

usaha yang dikelola oleh BUMDes. Penelitian terdahulu oleh Fahmi & Widiastuti (2019) dan Widodo (2020) juga mengkonfirmasi bahwa kuatnya modal sosial dalam komunitas desa memiliki dampak langsung pada peningkatan akses terhadap layanan keuangan formal di perdesaan. Oleh karena itu, penguatan modal sosial dapat menjadi strategi esensial bagi pemerintah desa guna mempercepat pencapaian inklusi keuangan.

### **Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan BUMDes**

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan. Literasi keuangan, yang meliputi serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan fundamental dalam pengelolaan keuangan, secara efektif membekali pengurus serta masyarakat desa untuk memahami secara cermat manfaat, risiko, dan mekanisme berbagai produk keuangan yang ditawarkan oleh BUMDes, sebagaimana diuraikan oleh OJK (2017). Individu yang memiliki tingkat literasi finansial yang tinggi cenderung lebih kompeten dalam mengambil keputusan keuangan yang komprehensif, menghindari jerat pinjaman informal berisiko tinggi, serta secara cerdas memanfaatkan produk tabungan dan kredit.

Data penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa responden yang aktif mengikuti program pelatihan keuangan desa menunjukkan tingkat partisipasi yang substansial lebih tinggi dalam mengakses layanan keuangan BUMDes dibandingkan dengan mereka yang belum pernah berpartisipasi. Temuan ini konsisten dengan pandangan Lusardi & Mitchell (2014) yang menegaskan literasi keuangan sebagai prasyarat utama untuk pemanfaatan layanan keuangan formal. Studi-studi sebelumnya oleh Hanifah & Israfiani (2021) serta Widyastuti & Nugroho (2021) juga secara empiris membuktikan bahwa peningkatan literasi melalui edukasi langsung berkorelasi signifikan dengan peningkatan jumlah nasabah dan volume transaksi pada lembaga keuangan di tingkat desa. Oleh karena itu, implementasi program literasi keuangan yang terarah dan sistematis, seperti workshop, pelatihan pencatatan keuangan, dan simulasi usaha, menjadi suatu keharusan bagi pengurus BUMDes guna mendorong peningkatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan secara berkelanjutan.

### **Pengaruh Modal Manusia dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan BUMDes**

Hasil uji simultan (uji F), dengan nilai F-hitung sebesar 97,533 dan tingkat signifikansi 0,000 (yang lebih kecil dari 0,05), dengan jelas menunjukkan bahwa variabel modal sosial dan literasi keuangan secara kolektif memberikan pengaruh yang signifikan terhadap inklusi keuangan BUMDes. Selanjutnya, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ), mengindikasikan bahwa

proporsi substansial dari variasi dalam inklusi keuangan dapat dijelaskan oleh kontribusi gabungan kedua variabel tersebut. Sisa variasi yang tidak dijelaskan oleh model ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lain, seperti kebijakan pemerintah, infrastruktur teknologi yang tersedia, atau kapasitas manajerial BUMDes.

Secara konseptual, integrasi antara modal sosial dan literasi keuangan membentuk sebuah ekosistem finansial di tingkat desa yang tangguh dan berkelanjutan. Modal sosial, dalam konteks ini, berperan sebagai faktor perekat yang menumbuhkan rasa kepercayaan, solidaritas, dan jaringan informasi yang kuat di antara anggota masyarakat. Sementara itu, literasi keuangan membekali individu dengan kapasitas kognitif dan keterampilan praktis yang esensial untuk mengelola serta memanfaatkan berbagai produk keuangan secara efektif. Narayan & Pritchett (1999) pernah menegaskan bahwa penguatan jaringan sosial tanpa diimbangi oleh pengetahuan finansial yang memadai hanya akan berujung pada solidaritas tanpa peningkatan produktivitas riil. Sebaliknya, literasi tanpa adanya kepercayaan yang kuat dalam komunitas justru akan menghadapi hambatan psikologis dan mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi. Studi yang dilakukan oleh Susanti & Haryanto (2020) serta Pertiwi & Santoso (2022) lebih lanjut menggarisbawahi bahwa desa-desa yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi dan literasi keuangan yang memadai seringkali menunjukkan peningkatan yang substansial dalam volume transaksi simpan pinjam serta pembiayaan untuk usaha-usaha produktif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Secara garis besar, riset ini mengindikasikan bahwa modal sosial secara signifikan dan positif memengaruhi inklusi keuangan pada BUMDes di Kabupaten Gorontalo. Observasi ini selaras dengan postulat teoretis yang menekankan peran substansial kepercayaan, jejaring, dan norma sosial dalam memfasilitasi akses serta partisipasi komunitas terhadap layanan keuangan. Demikian pula, literasi keuangan juga menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan, menggarisbawahi bahwa peningkatan kapabilitas kognitif, praktis, dan keyakinan finansial masyarakat pedesaan krusial untuk mendorong keputusan keuangan yang akurat dan optimalisasi penggunaan produk BUMDes. Secara kolektif, sinergi antara modal sosial dan literasi keuangan secara simultan berkontribusi substansial terhadap inklusi keuangan pada BUMDes. Kedua elemen ini berinteraksi secara komplementer: modal sosial membentuk basis kepercayaan dan keterlibatan, sedangkan literasi keuangan melengkapi individu dengan kapasitas analitis untuk mengoptimalkan partisipasi finansial mereka.

## Saran

Kendati demikian, studi ini dihadapkan pada beberapa limitasi substantif, antara lain adanya penekanan geografis spesifik pada Kabupaten Gorontalo serta potensi eksistensi faktor-faktor eksogen lain yang tidak terakomodasi dalam model yang diajukan. Guna pengembangan riset di masa mendatang, dianjurkan untuk memperluas cakupan areal investigasi, mengintegrasikan variabel mediasi atau moderasi tambahan, seperti kebijakan regulasi pemerintah daerah maupun inovasi produk BUMDes, serta mengimplementasikan pendekatan metodologi kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan pola perilaku keuangan komunitas.

Berdasarkan konklusi temuan tersebut, diajukan sejumlah rekomendasi strategis. Pertama, BUMDes dan otoritas pemerintahan desa esensial untuk memfasilitasi penguatan modal sosial melalui inisiatif programatik yang mendorong partisipasi aktif masyarakat, membina kepercayaan mutualistik, dan mengintensifkan kanal komunikasi. Kedua, implementasi program literasi keuangan yang sistematis dan terarah, yang mencakup lokakarya edukatif, pelatihan praktis, serta diseminasi informasi terkait produk-produk BUMDes, krusial untuk meningkatkan kompetensi finansial masyarakat. Ketiga, dukungan kebijakan yang proaktif dari pemerintah daerah sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi optimalisasi pengembangan BUMDes, termasuk di dalamnya alokasi infrastruktur teknologi yang memadai dan peningkatan kapasitas manajerial. Dengan demikian, diharapkan peningkatan inklusi keuangan di wilayah pedesaan dapat terwujud secara holistik dan berkelanjutan.

## DAFTAR REFERENSI

- Pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan melalui financial technology. *Jurnal Studi Manajemen dan Bisnis*, 10(2), 178–187. <https://doi.org/10.21107/jsmb.v10i2.23401>
- Abdul, R. S., & Erika, R. (2020). *Bumdes menuju optimalisasi ekonomi desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Anisyah, E. N., Pinem, D., & Hidayati, S. (2021). Pengaruh literasi keuangan, inklusi keuangan, dan financial technology terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Sekupang. *MBR (Management and Business Review)*, 5(2), 310–324. <https://doi.org/10.21067/mbr.v5i2.6083>
- Aprinthusari, M. N., & Widiyanto. (2020). Pengaruh literasi keuangan dan lingkungan sosial terhadap perilaku keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi. *Business and Accounting Education Journal*, 1(1). <https://doi.org/10.15294/baej.v1i1.38925>
- Arikunto, S. (2020). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.

- Astriwati, A., & Yusuf, Y. (2024). Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja keuangan UMKM di Kota Kendari dengan moderasi modal sosial. *Yume: Journal of Management*, 7(3), 1379–1389. <https://doi.org/10.24034/jiaku.v3i3.6456>
- Atkinson, A., & Messy, F. (2012). *Measuring financial literacy: Results of the OECD/International Network on Financial Education (INFE) pilot study* (OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 15). OECD Publishing.
- Bahiu, E. L., Saerang, I. S., & Untu, V. N. (2021). Pengaruh literasi keuangan, pengelolaan keuangan terhadap keuangan UMKM di Desa Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 1819–1828.
- Bank Indonesia. (2019). *Strategi nasional keuangan inklusif*.
- Beck, T., Demirgürç-Kunt, A., & Martínez Pería, M. S. (2007). Reaching out: Access to and use of banking services across countries. *Journal of Financial Economics*, 85(1), 234–266. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.07.002>
- Briliani, T. R. (2020). Pengaruh pendapatan, pengalaman keuangan, dan pengetahuan keuangan terhadap perilaku keuangan keluarga di Kota Madiun. *Journal of Business and Banking*, 9(2). <https://doi.org/10.14414/jbb.v9i2.1762>
- Coleman, J. S. (1990). *Foundations of social theory*. Harvard University Press.
- Demirgürç-Kunt, A., & Klapper, L. (2012). *Measuring financial inclusion: The Global Findex database* (World Bank Policy Research Working Paper 6025). <https://doi.org/10.1596/1813-9450-6025>
- Geriadi, M. A. D., Sawitri, N. P. Y. R., Wijaya, B. A., & Putri, I. G. A. P. T. (2023). [Judul artikel tidak tersedia].
- Imam, G. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Koto, M. (2021). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi literasi keuangan mahasiswa: Studi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Jurnal Akmami*, 2(3).
- Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2014). The economic importance of financial literacy: Theory and evidence. *Journal of Economic Literature*, 52(1), 5–44. <https://doi.org/10.1257/jel.52.1.5>
- Mulyani, S., Rahmawati, I., & Susanti, E. (2021). Modal sosial dan akses layanan keuangan mikro desa. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 29(2), 105–116.
- Narayan, D., & Pritchett, L. (1999). Cents and sociability. *Economic Development and Cultural Change*, 47(4), 871–897. <https://doi.org/10.1086/452436>

Nuryani, H. S., & Israfiani, R. (2021). Pengaruh literasi keuangan dan modal sosial terhadap inklusi keuangan masyarakat usia produktif di Sumbawa, Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(2), 35–42.

OECD. (2016). *OECD/INFE international survey of adult financial literacy competencies*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/28b3a9c1-en>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2017). *Strategi nasional literasi keuangan Indonesia*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2020). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) ketiga tahun 2019*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-2019.aspx>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Literasi keuangan*. OJK. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) tahun 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/documents/pages/survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2022/sp-survei-nasional-literasi-dan-inklusi-keuangan-tahun-2022.pdf>

Pankow, D. (2003). *Financial values, attitudes and goals*. North Dakota State University Extension Service.

Perry, V. G., & Morris, M. D. (2005). Who is in control? The role of self-perception, knowledge, and income in explaining consumer financial behavior. *Journal of Consumer Affairs*, 39(2), 299–313. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6606.2005.00016.x>

Pradana, G. B. A., & Suarmanayasa, I. N. (2022). Pengaruh literasi keuangan dan modal sosial terhadap inklusi keuangan pada buruh angkut barang di Pasar Banyuasri. *Bisma: Jurnal Manajemen*, 8(2), 273–281.

Pulungan, D., & Ndururu. (2019). Pengaruh literasi keuangan dan modal sosial terhadap inklusi keuangan mahasiswa. *Seminar Bisnis Magister Manajemen*.

Putnam, R. D. (1993). *Making democracy work*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400820740>

Rasjid, H., & Pakaya, S. I. (2024). Dampak literasi keuangan terhadap kinerja BUMDes dengan moderasi modal sosial. *CAPITAL: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 9(1), 123–136. <https://doi.org/10.25273/capital.v8i2.21341>

Rasjid, H., Pakaya, S. I., & Sila, Y. M. (2023). Pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. *Mandar: Management Development and Applied Research Journal*, 6(1), 80–90. <https://doi.org/10.31605/mandar.v6i1.3389>

Safryani, U., Aziz, A., & Triwahyuningtyas, N. (2020). Analisis literasi keuangan, perilaku keuangan, dan pendapatan terhadap keputusan investasi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 8(3). <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.384>

- Sambharakreshna, Y., Kusumawati, F., & Wulandari, A. (2024). Dampak pengelolaan keuangan dengan pendekatan kebebasan finansial, teknologi keuangan, dan modal sosial terhadap pendapatan usaha. *Ekomabis: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5(2), 175–192. <https://doi.org/10.37366/ekomabis.v5i02.1351>
- Sanistasya, P. A., Rahardjo, K., & Iqbal, M. (2019). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha kecil di Kalimantan Timur. *Jurnal Economia*, 15(1), 48–59. <https://doi.org/10.21831/economia.v15i1.23192>
- Sarma, M. (2008). *Index of financial inclusion* (ICRIER Working Paper No. 215). Indian Council for Research on International Economic Relations.
- Sugiyono. (2019). *Statistika untuk penelitian* (30th ed., p. 390). Alfabeta.
- Triutama, A. M. (2022). *Tingkat literasi keuangan pengelola BUMDes dalam pengembangan usaha pada BUMDes Desa Rosoan Kabupaten Enrekang* (Skripsi).
- Valentine, S., Rahmadana, M. F., Basmar, E., Purba, P. B., Nainggolan, N. L. E., Nugraha, R. T. S. A., Lifchatullah, E., Marit, E. L., Simarta, H. M. P. P., & Budi, A. (2020). *Ekonomi dan bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- World Bank. (2014). *Global financial development report: Financial inclusion*. World Bank.
- Wulandari, R. (2019). Pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap kinerja UMKM (Studi kasus pada UMKM Provinsi DKI Jakarta) [Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Jakarta].
- Xiao, J. J., & Porto, N. (2017). Financial education and financial satisfaction: Financial literacy, behavior, and capability as mediators. *International Journal of Bank Marketing*, 35(5), 805–817. <https://doi.org/10.1108/IJBM-01-2016-0009>
- Yessi, A. S. (2024). *Analisis pengaruh modal sosial, kewirausahaan, teknologi, dan peran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi rumah tangga dalam perspektif ekonomi Islam (Studi pada kelompok wanita tani Provinsi Lampung)* [Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung].
- Yuwan, L. S. (2020). Pengaruh pendidikan pengelolaan keuangan di keluarga, status sosial ekonomi, locus of control terhadap literasi keuangan (Pelajar SMA Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(2), 69–78.